

**LAPORAN PENELITIAN**

**KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DALAM  
MEWUJUDKAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA  
(SDM) APARATUR**



**OLEH:**

Henny Juliani, S.H., M.H. (Ketua) NIP : 196307171988023001  
F.C Susila Adiyanta, S.H., M. Hum (Anggota) NIP : 196609111992031003  
Pradipta Pranadewi Jayawardani (Anggota) NIM : 1101011530504

**Dibiayai oleh:**

**Dana Selain APBN Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun  
Anggaran 2018**

**FAKULTAS HUKUM  
Universitas diponegoro  
Semarang  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN PENELITIAN**

1. a. Judul Penelitian : KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN  
PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA  
(SDM) APARATUR
- b. Bagian : Hukum Administrasi Negara
- c. Bidang Ilmu/Konsentrasi : Ilmu Hukum/ Hukum Administrasi Negara
2. Peneliti
- Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap : Henny Juliani, S.H. M.H.
- b. Golongan/Pangkat/NIP : IVB/Pembina Tingkat I/ 196307171988032001
- c. JabatanFungsional : Lektor Kepala
- d. Bagian : Hukum Administrasi Negara
- e. AlamatRumah/Telp/Email : Jl. Candi Tembaga Utara Dalam 848  
Semarang/085641284581/hennyjuliani.fhundip@gmail.com
- Anggota Peneliti :
- a. Nama Lengkap : F.C. Susila Adiyanta, S.H., M. Hum.
- b. Golongan/Pangkat/NIP : IVA/ Pembina/196609111992031003
- c. JabatanFungsional : Lektor Kepala
- d. Alamat Rumah/Telp/Email : 081325525214/susilaadiyanta@gmail.com
3. Jumlah Peneliti Mahasiswa : 1 (satu) orang
- Nama Anggota/NIM : Pradipta Pranadewi J/11010115130504
4. Lokasi Penelitian : DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur
5. Kerjasama instansi lain : -
6. LamaPenelitian : 6 (enam) bulan
7. Biaya yang diperlukan : Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

Mengetahui  
Ketua Bagian HAN

Semarang, November 2018  
Ketua Peneliti,

Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H. M.Hum.  
NIP.197010281998022001

Henny Juliani, S.H. M.H.  
NIP: 196307171988032001

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum UNDIP

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP. 1967111919993032002

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat karunia yang telah dilimpahkanNya, sehingga laporan penelitian yang berjudul “Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah dalam Mewujudkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur” dapat terselesaikan. Laporan penelitian ini diajukan dan disusun guna memenuhi persyaratan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penelitian.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Diponegoro;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
4. Pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini;

Akhir kata dengan harapan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik dan bagi penulisan-penulisan hukum selanjutnya.

Semarang, November 2018

Peneliti

## ABSTRAK

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk bertindak aktif mencampuri urusan sosial ekonomi warganya dalam rangka mencapai tujuan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan SDM Aparatur yang melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Dengan demikian diperlukan birokrasi sebagai mesin kerja pemerintah yang andal, profesional dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Birokrasi hampir selalu menjadi pembahasan utama dalam administrasi publik karena dianggap sebagai institusi sektor publik yang seringkali dipersepsikan oleh masyarakat lamban, gemuk, tidak responsif, rawan dengan pungutan ilegal, serta menyulitkan dalam urusan pelayanan. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan reformasi terhadap birokratnya dalam peningkatan kinerjanya sehingga stigma buruk birokrat dapat terpatahkan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan sumber data yang diperoleh secara primer dan sekunder. Hasil penelitian selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa kebijakan reformasi birokrasi pemerintah dalam menunjang pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yang merumuskan arah kebijakan dan strategi peningkatan pelayanan publik, meliputi: (a) Memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; (b) Mendorong inovasi pelayanan publik; (c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; (d) Penguatan kapasitas dan efektifitas pengawasan pelayanan publik. Dalam praktek di lapangan, pemerintah telah banyak melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan budaya integritas dan disiplin pegawai, kewajiban menerapkan Kode Etik Pegawai, peningkatan inovasi pelayanan publik berbasis TIK, dan peningkatan akuntabilitas dan kinerja pegawai. Arah dan strategi kebijakan reformasi birokrasi pemerintah dalam mewujudkan profesionalisme SDM Aparatur melalui: (a) Penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif; (b) Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif dan berbasis TIK; (c) Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; (d) Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara; (e) Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan (f) Penguatan sistem informasi kepegawaian nasional. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya PerMenPan dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, yang diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: a. Kualifikasi, b. Kompetensi, c. Kinerja, dan d. Disiplin.

**Kata kunci:** *Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Profesionalitas SDM Aparatur*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah: .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Negara Hukum Indonesia .....	8
B. Reformasi Birokrasi .....	14
C. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Good Governance .....	26
D. Indikator Profesionalitas ASN .....	31
E. Data Pengukuran Indeks .....	34
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	37
A. Tujuan Penelitian .....	37
B. Manfaat Penelitian .....	37
BAB IV METODE PENELITIAN.....	38
A. Metode Pendekatan.....	38

B. Spesifikasi Penelitian .....	39
C. Objek dan Subjek Penelitian .....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data .....	43
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
A. Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah dalam Menunjang Pelaksanaan Pelayanan Publik.....	45
B. Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah dalam Mewujudkan Profesionalitas SDM Aparatur.....	66
C. Kualifikasi ASN.....	72
C. Kompetensi ASN .....	74
D. Kinerja ASN .....	82
E. Disiplin ASN.....	85
BAB VI PENUTUP.....	93
A. Simpulan .....	93
B. Saran .....	96
DAFTAR PUSTAKA .....	98

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 :	Isu Strategis dan Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi .....	53
Tabel 2 :	Area Perubahan dan Hasil Yang diharapkan .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Road Map Reformasi Birokrasi .....	20
Gambar 2.	Road Map untuk Menuju Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel .....	22
Gambar 3.	Road Map untuk Menuju Birokrasi yang Efektif dan Efisien .....	23
Gambar 4	Road Map untuk Menuju Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas .....	24
Gambar 5	Indeks Profesionalitas ASN .....	34
Gambar 6	Area Perubahan dan Sasaran Reformasi Birokrasi .....	60
Gambar 7	Profil PNS .....	73
Gambar 8	GAP Kompetensi JPT Pratama .....	76
Gambar 9	GAP Kompetensi Administrator .....	77
Gambar 10	Hasil Pemetaan Talenta Kepemimpinan/JPT .....	78
Gambar 11	Pengembangan Kompetensi .....	79
Gambar 12	Kurva Pengembangan Kompetensi Aparatur .....	79
Gambar 13	Tiga Jenis Kompetensi yang Perlu dikuasai oleh ASN .....	80
Gambar 14	Model Pengembangan Kompetensi Manajerial Berbasis Profil Pegawai .....	81
Gambar 15	Transformasi Sistem Organisasi dan Kepegawaian .....	90